KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tersangka Korupsi KTP-EL: Sebaiknya Setnov Meletakkan Jabatan
Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

TERSANGKA KORUPSI KTP-EL

Sebaiknya Setnov Meletakkan Jabatan

JAKARTA — Posisi Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar terus dikoyak oleh kader-kader di internal. Salah satu organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Generasi Muda Partai Golkar meminta Setya Novanto meletakkan jabatannya.

John A. Oktaveri & Lingga S. Wiangga
redaksi@bisnis.com

Meskipun rapat pleno Partai Golkar yang digelar dua pekan lalu memutuskan tetap mempertahankan jabatan Setya Novanto sebagai ketua umum yang tengah terbelit kasus hukum, organisasi itu menilai keputusan itu tidak disepakati secara bulat.

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan merupakan formalitas organisasi.

Dia menyebut banyak tokoh Golkar di pusat dan daerah ingin Setnov—panggilan Setya Novanto— segera mundur. Pihaknya akan terus melakukan konsolidasi dengan Dewan Kehormatan Partai Golkar seperti Jusuf Kalla, B. J. Habibie, dan Akbar Tandjung.

"Dalam waktu dekat kami akan *road show* ke tokoh di daerah dan akan ketemu dengan beberapa individu di dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan. Pandangan mereka tidak sama dengan formal organisasi," katanya, ditemui di gedung Komisi Yudisial, Senin (31/7).

Pihaknya pun tengah memetakan posisi Golkar di parlemen. Konsolidasi ini menurutnya bertujuan untuk menyamakan suara agar musyawarah nasional luar biasa dapat digelar untuk menunjuk ketua umum yang baru.

Langkah itu perlu dilakukan agar elektabilitas partai tidak merosot karena kasus yang menimpa Setnov. Sebabnya, anggapan masyarakat terkait kasus korupsi KTP berbasis elektronik selalu melekat pada Setya Novanto dan Partai Golkar.

"Ini proses penyadaran kader, taruhannya Golkar tidak dapat kepercayaan publik apa lagi ada *event* Pilkada serentak 2018 dan Pilpres serta Pileg serentak 2019 setelah UU Pemilu disahkan," katanya.

Menurutnya, penyelesaian terbaik demi penyelamatan partai adalah menggelar musyawarah nasional luar biasa, (Munaslub).

Kehadiran Ahmad Dolo Kurnia ke Komisi Yudisial untuk bertemu dengan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari.

Dalam kesempatan tersebut GMPG meminta Komisi Yudisial memprioritaskan pengawasan terhadap praperadilan yang kemungkinan akan diajukan Setnov.

Ahmad menambahkan, banyak pejabat negara yang terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa lepas dari jerat hukum dalam proses praperadilan.

Dia pun menilai tak mustahil Setnov lepas juga dari konsekuensi hukum jika mengajukan praperadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Aidul mengatakan sesuai fungsi Komisi Yudisial pihaknya akan melakukan pemantauan sidang tersebut. Bahkan dia menjanjikan pemantauan terhadap kasus Setnov akan menjadi prioritas.



Dalam kesempatan sebelumnya, Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mendesak agar Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR segera mundur.

Untuk posisi Ketua DPR, dia menilai tidak etis apabila seorang tersangka memimpin lembaga negara.

Dia menilai posisi Setya Novanto saat ini sebagai tersangka tidak bisa ditolerir. Dia mengatakan kini tinggal wewenang Fraksi Golkar untuk menonaktifkan Novanto dari DPR.

"Novanto sebaiknya fokus mengurus proses hukumnya. Saya bicara dalam kapasitas sebagai salah satu ketua di partai," ungkapnya, Jumat (28/7).

Dia menilai Partai Golkar telah dipermalukan kalau yang memimpin sidang notabene jadi tersangka. Menurutnya, kalau KPK sudah menetapkan tersangka maka akan ada peluang Novanto untuk ditahan.

"Ada upaya hukum yang ditingkatkan, kan hari ini dipanggil sebagai tersangka. Kalau nanti ditahan bisa ribut, *kan* enggak bagus."